

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Rizkah Amelia, 2020, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah (Studi Kasus Pada Pasar Ikan Banua Lima) Di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara”. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah di Pasar Ikan Banua Lima di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara serta faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan sampel secara *purposive sampling* berjumlah 12 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan dan uji kredibilitas data. Hasil penelitiannya menunjukkan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah di Pasar Ikan Banua Lima di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara belum optimal yakni: Pertama, sub variabel komunikasi diketahui indikator transmisi cukup baik karena UPT Pasar sudah menyampaikan peraturan kepada masyarakat,

indikator kejelasan belum baik karena pedagang dan pembeli belum memahami kebijakan yang ada, indikator konsisten cukup baik karena pelaksanaan pengelolaan pasar cukup konsisten. Kedua, sub variabel sumber daya di ketahui indikator staf cukup baik karena ada staf ahli yang lebih memahami kebijakan tersebut, indikator informasi cukup baik karena di sampaikan secara langsung oleh UPT Pasar, indikator wewenang cukup baik karena dilakukan oleh UPT Pasar, dan indikator fasilitas belum baik karena fasilitas yang ada belum tersedia dengan baik. Ketiga, sub variabel disposisi di ketahui indikator pengangkatan birokrasi cukup baik karena di serahkan kepada UPT Pasar, dan indikator insentif belum baik karena tidak ada insentif yang di berikan untuk orang-orang yang terlibat. Keempat, sub variabel struktur birokrasi di ketahui indikator SOP cukup baik karena kegiatan Pasar Ikan Banua Lima sesuai dengan SOP yang ada, dan indikator fragmentasi cukup baik karena sudah terlaksana dengan arahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbagi menjadi dua yaitu: Pertama, faktor pendukung terdiri dari koordinasi yang baik antar badan pelaksana seperti tanggung jawab UPT pasar terhadap Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM. Kedua, faktor penghambat terdiri dari kurangnya kejelasan kebijakan sebab tidak ada penyampaian peraturan secara menyeluruh, dan kurangnya tindakan tegas terhadap pelanggaran di pasar seperti tidak ada tindakan tegas kepada kendaraan yang masuk kedalam pasar. Untuk meningkatkan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah di Pasar Ikan Banua Lima di Kecamatan

Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka disarankan kepada Kepala UPT Pasar lebih memperhatikan lagi sarana dan prasarana serta lebih tegas dalam menindak pelanggaran di Pasar Ikan Banua Lima. Kepada pedagang hendaknya menggali atau mencari informasi yang lebih dalam lagi tentang peraturan-peraturan yang ada pada pasar. Dan kepada pembeli tidak membawa kendaraan masuk kedalam pasar, serta tidak melakukan tindak-tanduk yang dapat mengganggu aktivitas pasar.

2. Muhammad Wahyudin, 2022, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Di Pasar Senin Desa Pasar Senin Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus: Pasar Senin Desa Pasar Senin)”. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Tujuan peneliti ini untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerinah Di Pasar Senin Desa Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan pemakaian sumber data utama sebagai informan dengan menggunakan teknik penarikan sumber data yaitu *Sampling Snowball* sebanyak 13 orang dengan teknik analisa data, mencatat hasil catatan lapangan, mengumpulkan dan memilah-milah, berfikir dan uji kreadibilitas data Perpanjangan Pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, menggunakan bahan referensi, mengadakan membercheck. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi belum efektif, antara lain: Pertama, kinerja pemerintahan desa dalam pengelolaan pasar belum

maksimal dari segi kebersihan, kehygienisan makanan. Kedua, pelaksanaan pengelola pasar terkait pemantauan pasar kurang. Ketiga, kurangnya informasi dari pengelola pasar terhadap pedagang dan masyarakat. Keempat, pasar tidak terurus dan diperhatikan karna kurangnya sosialisasi. Kelima, dukungan dari segi sarana dan prasarana sangat kurang. Keenam, keamanan yang ada dipasar kurang optimal dikarnakan personil petugas yang masih kurang. Ketujuh, SOP (Standar Operasional) belum berjalan karna banyaknya pelanggaran. Kedelapan, sasaran kebijakannya pun menurut UU No 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan pasar belum optimal karena masih banyak pelanggar aturan Undang-undang dan SOP terkait pengelolaan pasar yang ada di Desa Pasar Senin. Saran dari penulis kepada pengelola pasar terutama dari segi koordinasi terhadap pedagang dan masyarakat diharapkan lebih ditingkatkan lagi guna tercapainya pasar yang selalu berkembang dan kepada pedagang diharapkan agar selalu berkoordinasi dan memberikan informasi kepada pihak terkait yaitu pengelola pasar dikarnakan informasi dari para pedagang sangat amat penting dan sangat dibutuhkan oleh pengelola pasar yang ada di Pasar Senin serta dukungan dari masyarakat apapun kebijakan pengelola pasar selama kebijakan dari pihak pengelola pasar itu membangun dan membawa dampak positif untuk perkembangan pasar yang ada di Desa Pasar Senin dengan adanya dukungan penuh dari masyarakat terutama masyarakat sekitaran Pasar Senin maka akan membawa dampak positif kepada pihak pengelola pasar dan pasar itu sendiri.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Istilah kebijaksanaan atau kebijakan yang diterjemahkan dari kata *policy* memang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah karena pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum (Said Zainal Abidin, 2016:3). Jadi kebijakan adalah keputusan yang berasal dari pemerintah untuk menyelesaikan kepentingan umum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan adalah rangkaian konsep untuk menyelesaikan beberapa permasalahan.

Menurut Aminuddin Bakry dalam (Hayat, 2018:17), mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia untuk kepentingan masyarakat, publik, maupun warga negara.

Menurut Fredrich dalam Agustino, (2017:166) “kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan dan kesempatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.

Anderson dalam (Irawaty Igrisa, 2022:32) mengemukakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Ia juga kebijakan/*policy* menjadi dua, yakni substantif dan prosedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan.

Sementara itu, Menurut David Easton kebijakan publik diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam hal ini hanya pemerintah yang dapat melakukan suatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Definisi kebijakan publik menurut Easton ini dapat diklasifikasikan sebagai suatu proses *management*, yang merupakan fase dari serangkaian kerja pejabat publik. Dalam hal ini hanya pemerintah yang mempunyai andil untuk melakukan tindakan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah publik, sehingga definisi ini juga dapat diklasifikasikan dalam bentuk intervensi pemerintah (Ida Syafriyani, 2023:3).

b. Tahap-tahap Kebijakan

Menurut William Dunn N Dunn dalam (Siti Marwiyah, 2022:14-16) tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut.

1) Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda merupakan sebuah proses yang sangat strategis dalam realitas dalam mengatur kebijakan publik. Dalam proses inilah ada didalam ruang untuk melaksanakan apa yang menjadi kebutuhan. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan sering disebut juga sebagai masalah kebijakan publik, biasanya muncul karena telah terjadi saling berpendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang sudah selesai atau akan ditempuh mengenai karakter permasalahan tersebut. Dalam *agenda setting* juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan (*policy issues*) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (*policy problem*). *Policy Issues* biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat diantara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut.

2) Formulasi Kebijakan (*Policy Formulating*)

Formulasi kebijakan merupakan masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan, setelah itu masalah didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.

Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat di pilih sebagai kebijakan yang di ambil untuk memecahkan masalah.

3) Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi ialah memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat di atur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sudah direncanakan harus didukung. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi symbol itu namun dimana melalui proses bagi warga negara belajar untuk mendukung pemerintah.

4) Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia.

5) Evaluasi Kebijakan/Penilaian

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian,

evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

c. Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan

Faktor menurut Suharno dalam Siti Marwiyah (2022:49-51) proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (*intended risks*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended risks*). Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah:

1) Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar

Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar.

2) Adanya pengaruh kebiasaan lama

Kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana dikutip oleh Nigro disebutkan dengan istilah *sunk cost*, seperti kebiasaan

investasi modal yang hingga saat ini belum profesional dan terkadang amat birokratik, cenderung akan diikuti kebiasaan itu oleh para administrator, meskipun keputusan/kebijakan yang berkaitan dengan hak tersebut di kritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus pantas untuk diikuti, terlebih kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut di pandang memuaskan.

3) Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi

Berbagai keputusan/kebijakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan/kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan/kebijakan.

4) Adanya pengaruh dari kelompok luar

Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan/kebijakan juga berperan besar. seperti masalah pertikaian kerja, pihak-pihak yang bertikai kurang respek pada upaya penyelesaian oleh orang dalam, tetapi keputusan yang diambil oleh pihak-pihak yang dianggap dari luar dapat memuaskan.

5) Adanya pengaruh keadaan masa lalu

Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan kebijakan atau keputusan. Misalnya, orang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena khawatir disalahgunakan

2. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Secara etimologis, konsep Implementasi menurut kamus Webster berasal dari bahasa Inggris, yaitu *Implement*. Dalam kamus, Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu dan memiliki efek yang sebenarnya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Definisi lain dari implementasi adalah menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu yang memiliki efek atau pengaruh pada sesuatu.

Menurut Nurdin Usman implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai suatu kegiatan.

Menurut Zainal Abidin (2019) Proses implementasi berkaitan dengan dua faktor utama, faktor utama internal dan faktor eksternal. Faktor utama internal merupakan kebijakan yang diimplementasikan, sedangkan faktor utama eksternal adalah kondisi lingkungan dan pihak-pihak terkait. Kondisi kebijakan adalah faktor yang paling dominan dalam proses implementasi karena yang diimplementasikan adalah kebijakan itu sendiri. Pada tingkat pertama, berhasil tidaknya implementasi suatu kebijakan ditentukan oleh kualitas dan ketetapan strategi implementasi.

b. Model-model Implementasi Kebijakan

1) Teori Donald Van Metter Dan Carl Van Horn

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam (Leo Agustino, 2016:133-136) ada enam variabel yang mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan, yakni:

a) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

b) Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumberdaya itu

nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi diluar sumber daya manusia, sumberdaya-sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah: sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu. Karena, mau tidak mau, ketika sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. Demikian pula halnya dengan sumberdaya waktu. Saat sumberdaya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan.

c) Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tindaklaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana projek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada

aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat-dapat saja agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambaran yang pertama. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

d) Sikap/Kecendrungan (*Disposition*) para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan adalah kebijakan "dari atas" (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

e) Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik

koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya.

f) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

2) Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S Grindle, dipengaruhi oleh dua variabel yakni : (Irawaty Igrisa, 2022:69-70)

- a) Isi Kebijakan, yang mencakup kepentingan kelompok sasaran dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran, perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, ketepatan letak sebuah program, sebuah kebijakan

menyebutkan aparat, pelaksanaanya dengan rinci, dan sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

- b) Lingkungan kebijakan, yang mencakup kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa, tingkat kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran.

3) Daniel Mazmania dan Paul A. Sabatier

Model ini disebut kerangka analisis implementasi, Mazmania dan Sabatier (Sahya Anggara, 2018:268-269) berpendapat bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijaksanaan negara adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang memengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, antara lain sebagai berikut.

- a) Mudah-tidaknya masalah yang akan dikendalikan, yang mencakup kesukaran teknis, keragaman perilaku kelompok sasaran, persentase kelompok sasaran dibandingkan dengan jumlah penduduk, dan ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan.
- b) Kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya, yang mencakup kejelasan dan konsistensi tujuan, digunakan teori kausal yang

memadai, ketepatan alokasi sumber dana, aturan-aturan keputusan dari badan pelaksana, rekrutmen pejabat pelaksana, dan akses formal pihak luar.

- c) Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijaksanaan tersebut, yang mencakup kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok, dukungan dari pejabat atasan, komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana.

4) Teori Brian W. Hogwood dan Lewis A Gun

Hogwood and Gun adalah seorang penulis Inggris yang sangat membela pandangannya tentang pentingnya pendekatan top-down untuk proses implementasi. Bagi mereka, pendekatan bottom-up yang cenderung menangani masalah implementasi berdasarkan kasus per kasus tidak menarik karena pembuat kebijakan adalah individu yang dipilih secara demokratis dan pandangan mereka tentang implementasi tidak melanggar demokrasi.

Ide dasar mereka berasal dari publikasi Gun yang menyelidiki penyebab kegagalan implementasi. Publikasi ini sedang dikembangkan dengan karyanya yang berjudul "*Policy Analysis for the Real World*" Di dalam tulisan tersebut memberikan proporsi untuk mencapai implementasi yang

sempurna bagi para pembuat kebijakan dalam (Dian Suluh Kusuma Dewi, 2022:134-135) antara lain sebagai berikut:

- a) Situasi di luar lembaga atau organisasi pelaksana tidak secara serius menghambat proses implementasi.
- b) Waktu dan sumber daya yang cukup tersedia untuk mengimplementasikan program.
- c) Tidak ada batasan dalam penyediaan semua sumber daya yang Anda butuhkan, termasuk sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap tahapan dalam proses implementasi.
- d) Kebijakan yang diterapkan didasarkan pada teori kausal atau sebab akibat yang valid.
- e) Hubungan sebab akibat bersifat langsung dan sesedikit mungkin ada hubungan antara atau intervening variabel.
- f) Diimplementasikan oleh satu lembaga yang terlibat hubungan kelembagaan ketergantungan sangat rendah.
- g) Adanya pemahaman yang utuh dan konsistensi antara tujuan yang ingin dicapai dan kondisi ini harus ada sepanjang proses implementasi.
- h) Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, untuk mensignifikasikan tugas yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang turut terlibat dalam urutan langkah-langkah pelaksanaan secara lengkap, detail dan sempurna.

5) Teori Menurut Charles O. Jones

Menurut Jones dalam buku Leo Agustino (2016:154-155) dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara seksama, yakni:

a) Organisasi

Pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit, dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak.

b) Interpretasi

Menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.

c) Penerapan

Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Secara lebih rinci mengenai organisasi, interpretasi, dan penerapan, penulis memaknainya sebagai berikut. Pertama, aktivitas pengorganisasian (*organization*) merupakan suatu upaya menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit-unit dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan (merealisasikan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan). Kedua, aktivitas interpretasi (*interpretation*) merupakan aktivitas penjelasan

substansi dan suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. Terakhir, ketiga, aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada. Bertumpu pada apa yang dikemukakan Jones di atas, maka masalah implementasi kebijakan publik atau implementasi program semakin lebih jelas dan luas. Di mana implementasi merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis dari pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi.

6) Teori Georgi C. Edward III

Dalam pandangan George C. Edward III implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel (Herabudin, 2016:127-131), yaitu:

a) Komunikasi

Untuk mencapai keberhasilan, implementasi kebijakan pemerintah mensyaratkan agar implementor mengetahui hal yang harus dilakukan secara jelas. Tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman, atau tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui oleh

kelompok sasaran, kemungkinan terjadi penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran sangat besar.

b) Sumber Daya

Implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya, baik sumber daya manusia, materi maupun metode. Sasaran, tujuan, dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, apabila implementor kekurangan sumber daya untuk pelaksanaan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Tanpa sumber daya, kebijakan tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayanan pada masyarakat..

c) Disposisi

Watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, ia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

d) Struktur Birokrasi

Dalam implementasi kebijakan, struktur organisasi mempunyai peranan penting. Salah satu aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures/SOP*), yaitu pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi

yang terlalu panjang cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yaitu birokrasi yang rumit dan kompleks, serta ini menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

3. Pengelolaan Pasar

a. Definisi Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata *management* atau *to manage* yang memiliki arti mengatur, mengelola, mengendalikan, dan memperlakukan. Sedangkan pengelolaan sendiri memiliki pengertian sebagai suatu proses sistematis untuk mencapai tujuan melalui perencanaan yang tepat, arahan, serta pemanfaatan secara maksimal sehingga semua tujuan yang direncanakan dapat diraih secara efektif dan efisien.

Manajemen berasal dari bahasa Inggris *management* dengan kata kerja *to manage* yang secara umum berarti mengurus. Dalam arti khusus manajemen dipakai bagi pemimpin dan kepemimpinan, yaitu orang-orang yang melakukan kegiatan memimpin. Dengan demikian manajer ialah orang yang memimpin atau pemimpin. (Muslichah Erma Widiana, 2020:01). Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Mary Parker Follet mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti

bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (*goals*) secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. (Sriyono, 2017:02)

b. Pengertian Pasar

Pasar dapat diartikan sebagai sebuah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Pasar juga sering dikaitkan dengan tempat transaksi tradisional dengan cara lama. (Syaparuddin, 2019:24)

Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang di jual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang. Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian. Ini adalah pengaturan yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk melakukan pertukaran. Persaingan sangat penting dalam pasar, dan memisahkan pasar dari perdagangan. Dua orang mungkin melakukan perdagangan, tapi dibutuhkan setidaknya tiga orang untuk memiliki pasar, sehingga ada persaingan pada setidaknya satu dari dua belah pihak. Pasar bervariasi dalam ukuran, jangkauan,

skala geografis, lokasi jenis dan berbagai komunitas manusia, serta jenis barang dan jasa yang diperdagangkan. (Binanga Et al, 2024:93)

c. Pengelolaan Pasar Daerah

- 1) Pengertian Pengelolaan Pasar Daerah Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pasar Daerah “merupakan pedoman, baik bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku pengelola maupun para pihak yang terkait dengan pemakaian tempat berjualan dipasar maupun ditempat-tempat tertentu yang diizinkan serta para Investor yang akan melakukan kerja sama dalam pembangunan dan pengelolaan”. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pengelolaan Pasar Daerah sangat diperlukan sebagai Dasar Hukum penyelenggaraan, pengaturan dan pengembangan pasar dan tempat berjualan pedagang, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas manfaat, adil dan merata serta memberdayakan perekonomian masyarakat. Pengelolaan pasar bertujuan untuk menciptakan, memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, memanfaatkan sumber daya milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat dan memberikan kesempatan kepada masyarakat atau Badan dalam mengelola atau memanfaatkan pasar untuk kemajuan daerah.

2) Tujuan Pengelolaan Pasar Daerah

Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan pasar Daerah Hulu Sungai Selatan; Pengelolaan pasar bertujuan menata, membina, mengawasi, membangun, dan mengevaluasi kegiatan perdagangan serta prasarana untuk:

- a) Menciptakan, memperluas dan pemerata kesempatan kerja di bidang perdagangan;
- b) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
- c) Memanfaatkan sumberdaya milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat;
- d) Memberikan kesempatan kepada masyarakat atau badan dalam mengelola dan memanfaatkan pasar untuk kemajuan daerah;
- e) Mempertahankan, menjaga dan melestarikan pasar sesuai peran dan fungsinya sebagai lembaga ketahanan ekonomi, sosial dan budaya; dan
- f) Mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan proses memilih aspek-aspek dalam tinjauan teori yang berhubungan dengan masalah penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Pasar Negara Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan tujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Seperti yang telah diuraikan dalam Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pasar

Daerah Kabupaten Hulu Sungai (Studi Kasus Pasar Negara). Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Hulu Sungai (Studi Kasus Pasar Negara) agar tidak melebar dari pembahasan penelitian ini memfokuskan pada dalam pandangan Edward III dalam buku Herabudin (2016:127) ada empat faktor yang terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan.

Maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

